



SALINAN

## PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 80 TAHUN 2012

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK  
SEKTOR PERTANIAN DI KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Tegal Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Untuk Sektor Pertanian;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 62);
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tegal.
5. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator Penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.

7. Lurah . . .

7. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan sebagai unsur Perangkat Daerah.
8. Pupuk adalah bahan kimia yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung maupun tidak langsung.
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaannya dan penyalurannya ditataniagakan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
10. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per kecamatan yang dihitung berdasarkan usulan dari petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan udang dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.
11. Harga eceran tertinggi yang selanjutnya disingkat dengan HET adalah harga pupuk bersubsidi di kios penyalur pupuk di tingkat desa/ Kecamatan yang dibeli oleh petani/ kelompok tani ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
15. Pembudidaya Ikan atau Udang perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya ikan atau udang.
16. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
17. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk urea, NPK, ZA, SP-36 dan atau pupuk organik di dalam negeri.
18. Distributor Pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
19. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada konsumen akhir (Petani/Peternak/Pembudidaya Ikan atau Udang).
20. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.
22. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota untuk tingkat Daerah.

## BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 2

Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, dan peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.

### Pasal 3

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

## BAB III KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan RDKK di tiap-tiap kecamatan.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan udang berdasarkan yang disetujui oleh penyuluh dan Lurah setempat.

### Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

## BAB IV CADANGAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 6

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atas sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB V . . .

BAB V  
PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk urea, SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Petrokimia Gresik dan PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Pasal 8

Pupuk bersubsidi di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus yang bertuliskan:

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"  
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengecer Resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pupuk Urea : Rp 1.800,- /kg;
  - b. Pupuk SP-36 : Rp 2.000,- /kg;
  - c. Pupuk ZA : Rp 1.400,- /kg;
  - d. Pupuk NPK : Rp 2.300,- /kg;
  - e. Pupuk Organik : Rp 500,- /kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
  - a. Pupuk Urea : 50 kg
  - b. Pupuk SP-36 : 50 kg;
  - c. Pupuk ZA : 50 kg;
  - d. Pupuk NPK : 50 kg atau 20 kg;
  - e. Pupuk Organik : 40 kg atau 20 kg.

Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang sesuai yang telah ditetapkan.

#### Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

### BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

#### Pasal 13

- (1) KP3 melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT – PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL).

#### Pasal 14

- (1) KP3 wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal.

#### Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 27 Desember 2012

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19680216 198903 1 004



LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR 80 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN  
 TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA  
 TEGAL TAHUN ANGGARAN 2013

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI DI KOTA TEGAL  
 TAHUN ANGGARAN 2013

No	Kecamatan	Bulan (ton)												Jumlah
		Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Tegal Barat	5	10	7	10	15	15	15	15	10	10	20	20	152
2	Tegal Timur	5	10	8	10	10	10	5	10	5	5	5	10	93
3	Tegal Selatan	15	15	10	15	20	20	25	20	20	25	25	35	245
4	Margadana	20	30	10	30	25	25	30	25	25	25	30	35	310
	Jumlah	45	65	35	65	70	70	75	70	60	65	80	100	800

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR 80 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN  
 TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA  
 TEGAL TAHUN ANGGARAN 2013

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI DI KOTA TEGAL  
 TAHUN ANGGARAN 2013

No	Kecamatan	Bulan (ton)												Jumlah
		Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Tegal Barat	-	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	19
2	Tegal Timur	-	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	18
3	Tegal Selatan	-	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42
4	Margadana	-	4	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	51
	Jumlah	0	12	8	13	13	13	11	11	11	13	13	12	130

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR 80 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN  
 TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK  
 SEKTOR PERTANIAN DI KOTA TEGAL  
 TAHUN ANGGARAN 2013

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI DI KOTA TEGAL  
 TAHUN ANGGARAN 2013

No	Kecamatan	Bulan (ton)												Jumlah
		Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Tegal Barat	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	30
2	Tegal Timur	2	1	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2	22
3	Tegal Selatan	2	1	3	3	6	5	5	5	4	4	4	4	46
4	Margadana	2	1	5	5	6	5	5	4	4	5	5	5	52
	Jumlah	8	5	11	11	18	14	14	14	13	14	14	14	150

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR 80 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN  
 TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK  
 SEKTOR PERTANIAN DI KOTA TEGAL  
 TAHUN ANGGARAN 2013

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI DI KOTA TEGAL  
 TAHUN ANGGARAN 2013

No	Kecamatan	Bulan (ton)												Jumlah
		Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Tegal Barat	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
2	Tegal Timur	5	2	2	5	5	5	5	2	2	2	5	5	45
3	Tegal Selatan	5	5	5	10	10	10	10	5	5	5	10	10	90
4	Margadana	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	105
	Jumlah	20	17	17	30	30	30	30	22	22	22	30	30	300

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR 80 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN  
 TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA  
 TEGAL TAHUN ANGGARAN 2013

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI DI KOTA TEGAL  
 TAHUN ANGGARAN 2013

No	Kecamatan	Bulan (ton)												Jumlah
		Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Tegal Barat	-	1	-	1	3	1	1	1	-	1	1	1	11
2	Tegal Timur	-	-	-	2	2	-	2	1	-	2	-	-	9
3	Tegal Selatan	-	1	-	2	3	2	1	1	-	1	-	2	13
4	Margadana	-	2	-	2	3	2	2	2	-	2	-	2	17
	Jumlah	0	4	0	7	11	5	6	5	0	6	1	5	50

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA